

INTISARI

Perubahan status Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), memunculkan otonomi dalam pengelolaan kegiatan pengadaan barang dan jasa (PBJ). Di sisi lain, kegiatan pengadaan barang dan jasa adalah salah satu titik rawan terjadinya *fraud*. Oleh karenanya, KAI sebagai auditor internal UGM mengimplementasikan *probity* audit sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan sistem pengadaan yang minim kecurangan. Akan tetapi, meskipun secara teoritis *probity* audit dinyatakan mampu mencegah *fraud* bukan berarti celah *fraud* menjadi hilang sama sekali. Hal ini, juga didukung oleh fakta bahwa masih terdapat permasalahan dan temuan BPK terkait pengadaan barang dan jasa di UGM. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi *probity* audit yang dilaksanakan oleh KAI dan kaitannya dengan pencegahan serta pendeteksian *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus (*case study*). Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara analisis dokumen dan wawancara pada pihak-pihak yang terkait dengan implementasi *probity* audit. Data yang didapatkan lalu direduksi, ditemakan dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Hasil penelitian menemukan bahwa *probity* audit yang dilaksanakan oleh KAI adalah audit berbasis resiko. Pemilihan paket pengadaan serta tahapan pengadaan yang akan diaudit berdasarkan pada seberapa tinggi tingkat resiko yang ada pada paket pengadaan tersebut sesuai dengan penilaian KAI. Selain itu, sesuai dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi *probity* audit oleh KAI, sudah cukup mampu mencegah dan mendeteksi *fraud* pengadaan barang dan jasa di Universitas Gadjah Mada.

Kata Kunci: PTN-BH, otonomi, pengadaan barang dan jasa, auditor internal, *probity* audit, *fraud* pengadaan barang dan jasa.

ABSTRACT

Universitas Gadjah Mada (UGM) transformation from the Public Service Agency (BLU) to the Legal Entities State University (PTN-BH) since 2012, led to the autonomy of its institution management and one of them is autonomy in procurement activities. On the other hand, procurement activity is one susceptible point to fraud. Thereby, KAI as the internal auditor of UGM implements probity audit as one effort to materialize procurement system with low fraud possibility. However, although theoretically probity audit is capable to preventing fraud, it does not mean that the fraud gap has disappeared. It is also supported by the fact that procurement activities in UGM still have problems and BPK's findings related to goods and services procurement in UGM. The research is aimed to analyze the implementation of probity audit by KAI and its relation with fraud prevention and detection in goods and services procurement.

This research was carried out using qualitative approach, with case study method. The data collection was conducted by means of document analysis and interviews to the parties related to probity audit implementation. The data obtained is then reduced, identified and analyzed for answering research questions.

The results find that the probity audit implemented by KAI is risk-based audit. The selection of procurement packages and stages to be audited is based on how high the risk level contained in the procurement package is compatible with the assessment implemented by KAI. Besides, based on research results, it can be concluded that probity audit implemented by KAI is sufficient to prevent and detect goods and services procurement fraud at Universitas Gadjah Mada.

Keywords: PTN-BH, autonomy, procurement of goods and services, internal auditor, probity audit, fraud of procurement